



**REVIEW**

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016-2021**



**DINAS PERIKANAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

Jl. Raung 5A Sumenep Telp. (0328) 662891 Fax. (0328) 672484  
SUMENEP



## **KATA PENGANTAR**

Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep berkomitmen untuk membangun Prestasi Aksi dan Prestasi Hasil melalui tugas pokok dan fungsinya sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021 telah menyusun Rencana Strategis yang fokus pada peningkatan produksi perikanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan dengan fokus pada pengembangan perikanan tangkap, budidaya dan pemasaran hasil perikanan.

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2016-2021 yang menjadi acuan segenap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan perikanan di Kabupaten Sumenep tidak hanya ditentukan dengan adanya perencanaan yang matang, melainkan juga diperlukan dukungan semua pihak terkait.

Masukan dan sumbangsih pemikiran sangat kami harapkan demi sempurnanya Dokumen Rencana Strategis ini. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Perikanan Kabupaten Sumenep 3 (tiga) tahun kedepan.

Sumenep, April 2018

**DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN SUMENEP**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD</b> .....	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep .....	8
2.2. Sumber Daya Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep.....	9
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep.....	15
2.4. Akuntabilitas Keuangan.....	17
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Sumenep.....	21
<b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS SKPD</b> .....	30
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep .....	30
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	31
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur .....	33
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	34
3.5. Faktor Pendorong dan Penghambat .....	37
3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	38



<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>41</b>
4.1. Tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep .....	41
4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep .....	41
<b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>43</b>
5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep .....	43
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA         PENDANAAN .....</b>	<b>44</b>
6.1. Rencana Program.....	44
<b>BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>47</b>
7.1. Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	47
<b>BAB VIII. PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>51</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi : (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Salah satu komponen yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah adalah perencanaan pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah diamanatkan bahwa setiap daerah Kabupaten/Kota wajib memiliki dokumen RPJMD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Undang-Undang 23 Tahun 2014 yang dimaksud RPJMD merupakan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.



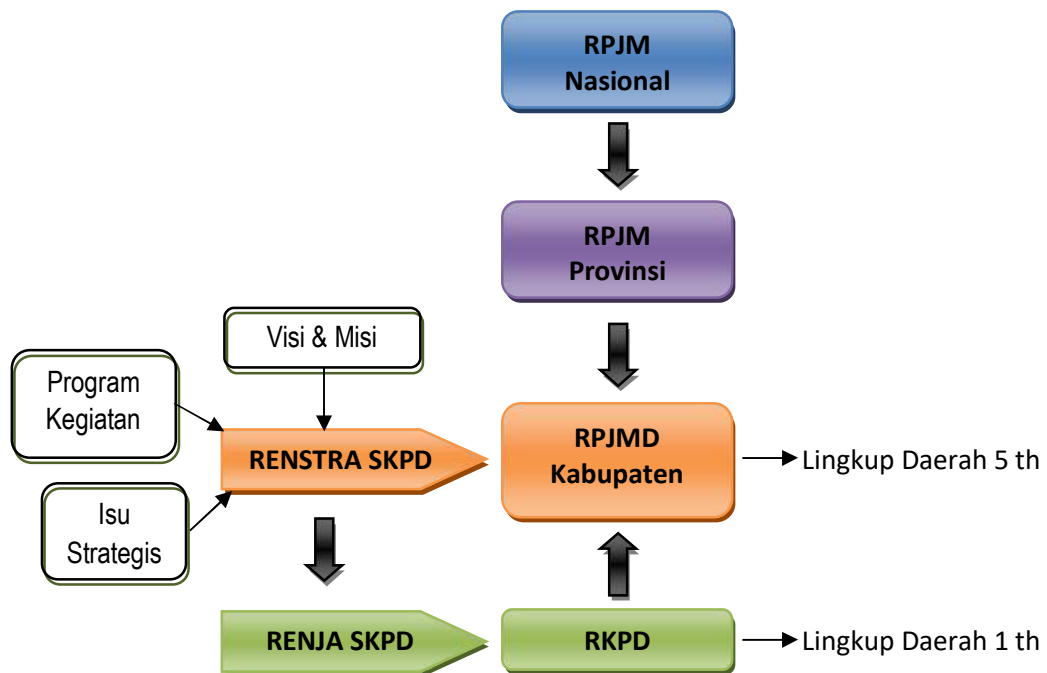
Penyusunan kajian teknokratik RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 memperhatikan Perda Nomor 09 tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025. RPJMD tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari tahap III RPJPD Kabupaten Sumenep tahun 2005-2025. Di dalam RPJP tersebut Visi yang akan dicapai adalah **Sumenep yang Sejahtera, Agamis dan Maju Mandiri**. Dalam rangka mencapai visi ditetapkan misi pembangunan daerah yang terdiri dari: (a) Penyediaan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mencapai taraf penghidupan yang layak; (b) Pemberdayaan industri kecil, menengah dan koperasi menuju kemandirian usaha yang berpihak kepada masyarakat; (c) Pengembangan fasilitas pelayanan publik terutama di bidang kesehatan, pendidikan serta pelayanan administrasi kependudukan dan perijinan yang berkualitas, murah menjangkau kebutuhan masyarakat; (d) Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia atas dasar kemampuan intelektual dan keterampilan serta keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; (e) Pengembangan sistem dan aparatur pemerintahan yang profesional, berkompeten, transparan dan memiliki akuntabilitas; (f) Pemanfaatan dan pemberdayaan potensi sumber daya alam, termasuk sektor pariwisata yang berwawasan lingkungan.

RPJMD selanjutnya menjadi acuan untuk membuat Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Sebagaimana amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RPJMD juga menjadi pedoman dalam penyusunan **Rencana Strategis (Renstra) SKPD**, yaitu dokumen perencanaan SKPD 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta bersifat indikatif.



Setiap SKPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Sumenep selanjutnya menjabarkan renstra tersebut ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 dapat dikatakan sebagai hulu dari seluruh alur pelaksanaan pembangunan yang wajib dijadikan pedoman bagi seluruh stakeholders yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Sumenep.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD harus mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Sumenep. Sehingga sangat penting bagi SKPD untuk dapat menerjemahkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang tercantum pada RPJMD, ke dalam tujuan/sasaran, strategi, kebijakan serta program prioritas di masing-masing SKPD beserta indikator capaian kerjanya.



Gambar 1.1  
Alur Penyusunan Renstra SKPD



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia



- Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);



16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana pembangunan jangka Panjang Kabupaten Sumenep 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10).



### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep 2016-2021 adalah sebagai pijakan pelaksanaan dan pedoman pelaksanaan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk menjabarkan Program/ kegiatan 3 (tiga) tahunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten Sumenep.

Sedangkan tujuan Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021;
- b. Sebagai dasar/ pedoman Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep untuk menentukan Sasaran dan Target Indikator Kinerja dalam melaksanakan program pembangunan bidang Perikanan 3 (tiga) tahunan secara sinergi dan berjenjang;
- c. Sebagai tolak ukur dan sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan program pembangunan melalui strategi dan kebijakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN SKPD

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep

##### a. Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep No. 28 Tahun 2008 dengan tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Otonomi Daerah bidang Perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan fungsi adalah :

1. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas Perikanan;
2. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan bidang Perikanan;
3. Pelaksanaan pembinaan teknis dan pengembangan usaha bidang Perikanan;
4. Pelaksanaan pemberian bimbingan, pengawasan dan perlindungan bidang Perikanan;
5. Pelaksanaan pembinaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta pendayagunaan sumberdaya Perikanan;
6. Pelaksanaan pengkajian dan aplikasi penerapan teknologi tepat guna, eksplorasi dan teknologi kelautan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### b. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretaris
  - Subbag. Keuangan;
  - Subbag Umum dan Kepegawaian;



- Subbag. Program dan Perencanaan.
  - 3) Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap
    - Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
    - Seksi Pengembangan Teknologi;
    - Seksi Produksi Perikanan Tangkap.
  - 4) Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil
    - Seksi Pemberdayaan Nelayan;
    - Seksi Perlindungan Nelayan;
    - Seksi Pengembangan Usaha Nelayan.
  - 5) Bidang Perikanan Budidaya
    - Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
    - Seksi Produksi Perikanan Budidaya;
    - Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya.
  - 6) Bidang Kelembagaan dan Pengendalian Usaha Perikanan
    - Seksi Kelembagaan;
    - Seksi Data dan Informasi;
    - Seksi Pengendalian Usaha Perikanan.
  - 7) UPT Perikanan Kecamatan;
  - 8) UPT Tempat Pelelangan Ikan.
- Struktur Organisasi sebagaimana terlampir.

## **2.2. Sumber Daya Dinas Perikanan Kab. Sumenep**

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia**

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah mulai 1 Januari 2001 telah dilakukan Restrukturisasi Organisasi Pemerintah Daerah dan Revitalisasi Aparatur Pemerintah. Restrukturisasi kelembagaan sebagai upaya untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, yang didukung aparat pemerintah yang amanah dan profesional.



Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep mempunyai struktur organisasi dengan Jabatan Struktural sebagai berikut :

- 1 orang pejabat Eselon II / b (Kepala Dinas);
- 1 orang pejabat Eselon III / a (Sekretaris);
- 4 orang pejabat Eselon III / b (Kepala Bidang);
- 15 orang pejabat Eselon IV / a (Kasi, Kasubag);
- 14 orang pejabat Eselon IV / a ( Kepala UPT).

Dalam Tahun Anggaran 2017 jumlah pegawai pada Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep tercatat sebagai berikut :

➤ Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat dan golongan

- Golongan IV / c : 1 orang
  - Golongan IV / b : 2 orang
  - Golongan IV / a : 2 orang
  - Golongan III / d : 24 orang
  - Golongan III / c : 5 orang
  - Golongan III / b : 6 orang
  - Golongan III / a : 5 orang
  - Golongan II / d : - orang
  - Golongan II / c : 4 orang
  - Golongan II / b : 2 orang
  - Golongan II / a : - orang
  - Golongan I : - orang
- 51 orang

➤ Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan

1. Pasca Sarjana :

- Non Perikanan : 10 orang

2. Sarjana :

- Perikanan : 10 orang
- Non Perikanan : 11 orang

3. Diploma :

- Diploma III Perikanan : 1 orang
- Diploma III Non Perikanan : 1 orang



4. SLTA :
- Kejuruan : 4 orang
  - Umum : 14 orang
5. SLTP : : - orang
6. SD : : - orang

➤ Jumlah Pegawai berdasarkan tugasnya

- Kepala Dinas : 1 orang
  - Sekretaris Dinas : 1 orang
  - Kepala Bidang : 3 orang
  - Ka. Sub. Bagian : 3 orang
  - Ka. Seksi : 12 orang
  - Ka. UPT : 14 orang
  - Staf : 17 orang
- 51 orang

➤ Jumlah Pegawai berdasarkan Usia

- Usia < 30 th : - orang
  - Usia 30 – 39 th : 9 orang
  - Usia 40 – 49 th : 22 orang
  - Usia 50 – 55 th : 13 orang
  - Usia > 55 th : 7 orang
- 51 orang

Dengan kondisi geografis Kabupaten Sumenep yang sangat luas meliputi 126 pulau dengan 20 kecamatan pesisir dan 156 desa pesisir, luas perairan 50.000 Km<sup>2</sup> dengan panjang pantai 577,76 Km<sup>2</sup> serta jumlah nelayan kecil sebanyak 40.200 orang, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi pada Dinas Perikanan pada tahun 2017 **kurang memadai** baik dari segi kualitas dan kuantitas.



### 2.2.2. Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja

Kondisi sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep berdasarkan Laporan Mutasi Barang tahun 2017 sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja**  
**Dinas Perikanan Tahun 2017**

NO	NAMA / JENIS BARANG	MERK/TYPE	JUMLAH	KET
<b>SARANA</b>				
<b>A</b>	<b>ALAT ANGKUT</b>			
1	Mobil	Carry	3	Baik
2	Mobil	T. Kijang	1	Baik
3	Mobil	Kijang / Inova	1	Baik
4	Mobil Pick Up	Mitsubishi / L300	1	Baik
4	Sepeda Motor	Honda	27	Baik
5	Sepeda Motor	Suzuki	2	Baik
6	Sepeda Motor	Yamaha	2	Baik
7	Kapal Motor	LCT	1	
<b>B</b>	<b>ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR</b>			
1	Maket Alat Tangkap Ikan		1	Baik
2	GPS		1	Baik
3	Rol meter	Jason	2	Baik
4	Sketchmach	Jason	2	Baik
	Water test kit microbiology		1	Baik
<b>C</b>	<b>ALAT PERTANIAN DAN PETERNAKAN</b>			
1	Alat ukur jaring		1	Baik
2	Lacuda	500 W	1	Baik
3	Teropong	Binocular	2	Baik
<b>D</b>	<b>KLASTER RUMPUT LAUT</b>			
1	Boiler	Stream	1	
2	Cooking Range		2	
3	Mesin Pencuci Sayuran		4	
4	Tank		4	
5	Alat Pemetong Stringe		1	
6	Crane Hoist		1	
7	Hoper		1	
8	Instrument Cabinet		1	
9	Reservoir Tank + Pompa		1	



E	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			
1	AC	National, LG, Sharp, Polytron, Panasonic	9	Baik
2	Almari		3	Baik
3	Almari Kayu		4	Baik
4	AMP UTP Cable Cat SE, 4pair 300 m		1	Baik
5	Brankas	Dameci, Zigler Safe	3	Baik
6	CCTV	Hikvision	1	Baik
7	CPU	HP Pavilion	4	Baik
8	FAXIMILE		1	Baik
9	Filling Kabinet		4	Baik
10	Horden	Phyna	1	Baik
11	HP Proliant ML110		1	Baik
12	Hypergain 24 DBI Grid Antena 24 Ghz		1	Baik
13	Kamera	Sony	1	Baik
14	Komputer / PC	Intel, HP Pavilion	16	Baik
15	Kursi Kerja / Rapat	Olympic, Verona, Malvin	11	Baik
16	Lanet WLLTN		1	Baik
17	Laptop	Compac, Asus, Toshiba	4	Baik
18	Lemari Arsip	VIP	7	Baik
19	Meja Kerja / Rapat	Orbitrend, 120x60, Informa	13	Baik
20	Meja Kursi Tamu	SIRO	4	Baik
21	Mesin Tik	Olimpia	7	Baik
22	Mesin Pemotong Rumput		1	Baik
23	Mesin Penghancur Kertas	Secure Maxi 24SC	5	Baik
24	Monitor LCD	HP Pavilion	3	Baik
25	Notebook		1	Baik
26	Over Head Projector		1	Baik
27	Papan Informasi / Papan Nama	Kota, Pasongsongan, Kalianget, Pragaan, Saronggi, Bluto, Ambunten, Dungkek	35	Baik
28	Pemadam Kebakaran 6 Kg		2	Baik
29	Pengkabelan		1	Baik
30	Planet FSD1600		1	Baik
31	Planet VIP400 + 2 pesawat telepon		1	Baik
32	Planet WAP4000 = box untuk out door		1	Baik
33	Planet WLSMA0,6		1	Baik
34	Podium		1	Baik
35	Printer	Canon, HP Laser Jet, Epson, Fargo	27	Baik
36	RJ45 Connector		1	Baik
37	Scanner		3	Baik
38	Tangga	Scaffolding	1	Baik
39	Televisi	National, LG, Sony, Panasonic	4	Baik
40	Teralis		1	Baik
41	Tong Sampah	Maspion	1	Baik
42	UPS / Stabilizer	Avapro	2	Baik



<b>E</b>	<b>ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI</b>			
1	DVD Player	Panasonic	1	Baik
2	Faximili	Panasonic	1	Baik
3	Handy Cam	Sony TRV 38 E, Sony HDR CX-150	5	Baik
4	Kamera	DSC - TX5, Nikon, Sony DSC - WX7, Coolpix 3700	10	Baik
5	LCD Proyektor	Panasonic, BenQ	2	Baik
6	Megaphone	ZR 2015 S/TOA	2	Baik
7	Proyektor		1	Baik
8	Sound System	Portable Wireless	1	Baik
9	Teropong	Vanguard	1	Baik
10	Wireless	Panasonic, Soundcrest	2	Baik
<b>F</b>	<b>Alat Laboratorium</b>			
1	Alat-alat Laboratorium Perikanan		1	Baik
2	Mikroskop		1	Baik
<b>G</b>	<b>Alat Keamanan</b>			
1	Jaket Pelampung		1	Baik
2	Baju Renang / Left Jacket		1	Baik
<b>NO</b>	<b>NAMA / BANGUNAN</b>	<b>LUAS</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KET</b>
<b>PRASARANA</b>				
1	RUMAH DINAS	595	1	RR
2	BALAI BENIH IKAN	17460	1	RR
3	PENGERINGAN IKAN	2510	1	RB
4	TPI	1437	1	B
5	KANTOR TPI	900	1	B

Sumber : Laporan Mutasi Barang Dinas Perikanan 2017

#### a. Faktor Internal

Dari kondisi sarana yang ada **cukup memadai** dalam mendukung kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep secara internal, akan tetapi adanya peningkatan sarana secara berkesinambungan juga akan lebih mendukung SDM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

#### b. Faktor Internal

Dari kondisi prasarana yang ada **kurang memadai** dalam mendukung kinerja pelayanan, oleh sebab itu diperlukan dukungan secara menyeluruh disetiap sektor dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat yang optimal.



### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep

Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep sampai dengan Tahun 2017 dengan Target Jangka Menengah Daerah tahun 2019 sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target RPJMD 2019**  
**Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep**

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TARGET	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	MISI 3 : Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul dan berdaya saing tinggi	1. Meningkatnya Produksi Perikanan	Nilai Tukar Nelayan	Jumlah Pendapatan Nelayan per-Kapita	Jumlah Pendapatan Masyarakat Nelayan per-Kapita	28.753.583	-
				Jumlah Kelompok Perikanan yang Berhasil dibina & Berbadan Hukum (klpk)	Jumlah Kelompok Perikanan yang Berhasil dibina & Berbadan Hukum (klpk)	170	-
		2. Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Hasil Perikanan (Ton)	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Hasil Produksi Perikanan : - Perikanan Tangkap (ton) - Perikanan Budidaya (ton)	48.600 1.517	47.605,44 532.630,31



	2. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian untuk mendukung ketahanan pangan daerah	% pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap PDRB	Meningkatnya manfaat ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan	Jumlah Pertumbuhan Produksi Sumberdaya Laut lainnya /Rumput Laut (ton basah)	-	530.422,37
				Jumlah Pertumbuhan tingkat konsumsi ikan (kg/kap/th)	-	49,20
				Jumlah Pemberdayaan Kelompok Nelayan /Jumlah Kelompok yang dibina dan Berbadan Hukum (klpk)	-	126
				Jumlah Wirausaha Muda Bidang Perikanan (org)	-	64
				Produksi Garam Rakyat (ton)	-	232.393,29

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan bahwa realisasi sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan rencana akhir RPJMD pada tahun 2019 menghasilkan nilai rata-rata sebesar **4.451,09%**, termasuk predikat **Sangat Berhasil**. Hal ini dikarenakan perubahan indikator RPJMD Tahun 2019 dengan indikator RPJMD Tahun 2017, terutama pada indikator Hasil Produksi Perikanan Budidaya. Hasil Perikanan Budidaya pada RPJMD Tahun 2017 terdiri dari target budidaya ikan dan budidaya non-ikan/rumput laut, sehingga berpengaruh terhadap target indikator Hasil Perikanan Budidaya pada RPJMD Tahun 2019 yang berfokus terhadap jumlah budidaya ikan dan dihapusnya target non ikan.



Sedangkan indikator Jumlah Pertumbuhan Produksi Sumberdaya Laut lainnya/Rumput Laut, Jumlah Pertumbuhan Tingkat Konsumsi Ikan, Jumlah Pemberdayaan Kelompok Nelayan/ Jumlah Pertumbuhan Kelompok yang dibina dan Berbadan Hukum, Jumlah Wirausaha Muda Bidang Perikanan dan Produksi Garam Rakyat dihapuskan dalam RPJMD Tahun 2019.

#### **2.4. Akuntabilitas Keuangan**

Tingkat capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep selama tahun 2017 diuraikan sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;
  - 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  - 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor;
  - 7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
  - 8) Penyediaan Makanan dan Minuman;
  - 9) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
  - 10) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah;
  - 11) Pameran Pembangunan.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - 1) Pembangunan Gedung Kantor;
  - 2) Pengadaan Komputer;
  - 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
  - 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
  - 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer;
  - 6) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor.
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan



- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - 2) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.
- d. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- 1) Peningkatan Prasarana Penangkapan Ikan;
  - 2) Pelatihan Pengoperasionalan dan Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan;
  - 3) Pengadaan Sarana Penangkapan Rajungan;
  - 4) Pengadaan Paket Jaring Milenium;
  - 5) Pengadaan Paket Penangkapan Ikan Kakap;
  - 6) Pengadaan Paket Penangkapan Gurita.
- e. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
- 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Lele.
- f. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
- 1) Pengadaan Sarana Budidaya Ikan Unggul;
  - 2) Penebaran Ikan di Perairan Umum;
  - 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar;
  - 4) Pengadaan Sarana Budidaya/ Bibit Kerapu;
  - 5) Pengembangan Demfarm Budidaya Rumput Laut Metode Longline;
  - 6) Pengembangan Demfarm Budidaya Rumput Laut Metode Rakit;
  - 7) Pengadaan Sarana Tambak Ikan/Udang;
  - 8) Fasilitasi Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR).
- g. Program Pengembangan Informasi dan Promosi Perikanan
- 1) Up Dating Data Base Sumber Daya Perikanan.
- h. Program Perlindungan dan Pengendalian Usaha Perikanan
- 1) Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan;
  - 2) Sosialisasi Kelengkapan Dokumen Kapal Perikanan.
- i. Program Pengembangan Wirausaha Muda
- 1) Pengembangan Usaha Pembuatan Probiofish;
  - 2) Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar;
  - 3) Penumbuhan Usaha Pembibitan Rumput Laut Kultur Jaringan.



- j. Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dan Pembudidaya Kecil
- 1) Fasilitasi Teknis dan Kelembagaan Kelompok usaha Masyarakat Pesisir;
  - 2) Sosialisasi FORIKAN dan GEMARI;
  - 3) Inventarisasi dan Pembinaan Kelompok Nelayan;
  - 4) Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi;
  - 5) Fasilitasi Asuransi Nelayan;
  - 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan;
  - 7) Fasilitasi Industri Pengolahan Hasil Perikanan;
  - 8) Fasilitasi Pembentukan dan Pemberdayaan Koperasi Nelayan;
  - 9) Monitoring dan Evaluasi Kelompok Perikanan.

**Tabel 2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Dinas Perikanan TA. 2017**

No	Uraian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
<b>1</b>	<b>Belanja Daerah :</b>			
	Belanja Tidak Langsung	3.888.201.990,-	3.541.449.300,-	91,08
	Belanja Langsung	7.574.662.024,-	6.567.766.478,-	86,71
	<b>TOTAL</b>	<b>11.462.864.014,-</b>	<b>10.109.215.778,-</b>	<b>88,19</b>

Secara garis besar realisasi Belanja Daerah sebesar 88,19% yang terinci dari Belanja Tidak Langsung merupakan Belanja Pegawai yang terdiri dari Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS. Dari pagu sebesar Rp. 3.888.201.990,- terealisasi sebesar 3.541.449.300,- atau sebesar 91,08%. Belanja Langsung dengan pagu sebesar Rp. 7.574.662.024,- terealisasi sebesar Rp. 6.567.766.478,- atau sebesar 86,71%.



## 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep

### a. Tantangan

Kabupaten Sumenep adalah kabupaten yang terdiri dari 126 pulau dengan 20 Kecamatan pesisir dan 156 desa pesisir. Luas Perairan 50.000 Km<sup>2</sup> dengan panjang pantai 577,76 Km<sup>2</sup>. Potensi tersebut menempatkan Kabupaten Sumenep sebagai daerah yang dikaruniai sumber daya kelautan yang besar termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati kelautan.

Berdasarkan letak geografis Kabupaten Sumenep dimana sebagian wilayah merupakan wilayah kepulauan dan laut sehingga memiliki potensi yang cukup besar dari perikanan darat maupun perikanan laut.

Adapun data produksi hasil perikanan dan kelautan Kabupaten Sumenep pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Komoditas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumenep**  
**Tahun 2017**

No	KOMODITI	PRODUKSI (TON)	NILAI	SENTRA PRODUKSI
1	Rumput Laut	530.422,37	2.071.736.013	Kec. Bluto, Saronggi, Gili Genting, Talango, Gapura, Dungek, Ra'as, Sapeken Arjasa
2	Garam Rakyat	232.392,39	-	Kec. Saronggi, Pragaan, Gapura, Gili Genting, Kalianget, Ra'as, Sapeken, Arjasa, Kangayan
3	Ikan Kering	9.674,30	-	
4	Ikan Asap/Pindang	4.371,17	-	
5	Layang	3.951,50	55.316.800	
6	Tongkol Komo	3.116,20	28.036.800	
7	Ikan Lain - Lain	3.024,50	38.781.500	
8	Cakalang	2.851,80	34.215.600	
9	Kakap Merah/Bambangan	2.443,10	145.536.500	
10	Kembung	2.398,50	38.760.00	
11	Kakap Putih	2.104,60	67.362.400	
12	Kerapu Lumpur	1.999,90	63.969.500	Kec. Ra'as, Sapeken
13	Bawal Hitam	1.883,00	56.961.000	
14	Tengiri	1.855,30	66.902.100	
15	Teri	1.816,00	13.448.500	
16	Teri Nasi	1.621,10	29.002.500	
17	Selar	1.433,90	14.379.400	
18	Bandeng	1.300,00	19.500.000	Kec. Pragaan, Saronggi, Kalianget, Gapura, Kangayan
19	Peperek	1.263,90	3.445.550	
20	Ekor Kuning	1.256,20	21.978.900	
21	Tembang	1.247,30	13.244.700	



22	Udang Windu	1.058,30	84.672.000	Kec. Kandangan
23	Cumi – Cumi	974,30	29.226.000	
24	Cucut	969,80	15.033.500	
25	Layur	968,80	14.379.700	
26	Gurita	941,60	20.940.100	
27	Manyung	930,30	12.394.900	
28	Tripang	928,50	110.390.200	
29	Lencam	850,00	15.114.500	
30	Rajungan	794,30	32.513.900	
31	Julung - Julung	767,10	5.376.000	
32	Udang Vannamei	747,25	48.571.380	Kec. Pragaan, Bluto, Saronggi, Talango, Kalianget, Dasuk, Gapura, Batang-Batang, Dungkek, Ambunten, Rubaru, Dasuk, Batuputih, Gapura, Kandangan
33	Pari	730,90	5.547.500	
34	Kepiting	598,90	22.995.000	
35	Gulamah	576,50	5.028.350	
36	Terasi	538,33	-	
37	Kurisi	442,10	11.040.000	
38	Swangi	287,30	2.170.000	
39	Kuwe	256,00	5.164.600	
40	Lele	123,06	2.153.550	Kec. Pragaan, Bluto, Saronggi, Kota Sumenep, Batuan, Lenteng, Ganding, Guluk-Guluk, Ambunten, Rubaru, Dasuk, Batuputih, Gapura
41	Belanak	56,80	529.250	
42	Udang Barong/Lobster	51,50	11.317.500	
43	Kerapu Macan	40,90	451.300	Kec. Ra'as, Sapeken
44	Lemuru	12,90	59.600	
45	Bawal Putih	4,50	554.000	
43	Semah	2,00	-	
44	Kerapu Sunu	0,40	140.000	Kec. Ra'as, Sapeken
45	Kerapu Bebek	0,20	105.000	Kec. Ra'as, Sapeken

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, 2017

## 1. Data Potensi Perikanan Tangkap

- Luas Perairan : 50.000 m<sup>2</sup>;
- Jumlah Pulau berpenghuni dan Tidak berpenghuni : 126 pulau;
- Jumlah Kecamatan Berpesisir : 20 kecamatan;
- Jumlah Perahu : 7.366 unit;
- Jumlah Alat tangkap Ikan : 33.047 unit;
- Produksi Perikanan Tangkap : 48.165 ton;
- Jumlah Nelayan : 41.810 orang.



Tabel. Data Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Sumenep Tahun 2017

NO	KECAMATAN	LAUT		PERAIRAN UMUM		JUMLAH	
		PRODUKSI	NILAI	PRODUKSI	NILAI	PRODUKSI	NILAI
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 5	8 = 4 + 6
1	Pragaan	1.984,80	11.867.000,00	-	-	1.984,80	11.867.000,00
2	Bluto	1.186,70	11.867.000,00	-	-	1.186,70	11.867.000,00
3	Saronggi	1.098,30	10.983.000,00	19,80	99.000,00	1.118,10	11.082.000,00
4	Giligenting	1.410,60	14.106.000,00	-	-	1.410,60	14.106.000,00
5	Talango	1.297,50	12.975.000,00	-	-	1.297,50	12.975.000,00
6	Kalianget	1.341,20	13.412.000,00	-	-	1.341,20	13.412.000,00
7	Sumenep	-	-	-	-	-	-
8	Batuan	-	-	-	-	-	-
9	Lenteng	-	-	7,80	39.000,00	7,80	39.000,00
10	Ganding	-	-	5,80	29.000,00	5,80	29.000,00
11	Guluk-Guluk	-	-	7,10	35.500,00	7,10	35.500,00
12	Pasongsongan	4.033,70	40.337.000,00	6,20	31.000,00	4.039,90	40.368.000,00
13	Ambunten	3.074,20	30.742.000,00	11,40	57.000,00	3.085,60	30.799.000,00
14	Rubaru	-	-	-	-	-	-
15	Dasuk	2.725,90	27.259.000,00	-	-	2.725,90	27.259.000,00
16	Manding	-	-	0,20	1.000,00	0,20	1.000,00
17	Batuputih	1.603,80	16.038.000,00	-	-	1.603,80	16.038.000,00
18	Gapura	2.161,00	21.610.000,00	-	-	2.161,00	21.610.000,00
19	Batang-Batang	3.847,20	38.472.000,00	-	-	3.847,20	38.472.000,00
20	Dungkek	4.093,24	40.932.400,00	-	-	4.093,24	40.932.400,00
21	Nonggunong	2.329,30	23.293.000,00	-	-	2.329,30	23.293.000,00
22	Gayam	1.997,70	19.977.000,00	-	-	1.997,70	19.977.000,00
23	Raas	2.315,30	23.153.000,00	-	-	2.315,30	23.153.000,00



24	Sapeken	4.299,50	42.995.000,00	-	-	4.299,50	42.995.000,00
25	Arjasa	1.098,40	10.984.000,00	-	-	1.098,40	10.984.000,00
26	Kangayan	1.460,30	14.603.000,00	-	-	1.460,30	14.603.000,00
27	Masalembu	4.188,50	41.885.000,00	-	-	4.188,50	41.885.000,00
<b>Total Produksi</b>		<b>47.547,14</b>	<b>467.490.400,00</b>	<b>58,30</b>	<b>291.500,00</b>	<b>47.605,44</b>	<b>467.781.900,00</b>



## 2. Data Potensi Perikanan Budidaya

- Potensi Lahan Budidaya Laut : 287.324,75 Ha; eksisting 143.720,38 Ha;
- Keanekaragaman Potensi Lahan Budidaya Air Payau : 3.539,68 Ha; 2.149,50 Ha (eksisting);
- Fisiografi Potensi Lahan Budidaya Air Tawar : 24,5 Ha; 18,50 Ha (eksisting).

**Tabel. Data Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Sumenep Tahun 2017**

NO	KECAMATAN	BUDIDAYA RUMPUT LAUT		BUDIDAYA UDANG VANNAMEI		BUDIDAYA UDANG WINDU		BUDIDAYA KERAPU		BUDIDAYA BANDENG		BUDIDAYA LELE		JUMLAH	
		(Ton Basah)	Nilai	(Ton)	Nilai	(Ton)	Nilai	(Ton)	Nilai	(Ton)	Nilai	(Ton)	Nilai	(Ton)	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pragaan	-	-	126,150	8.199.750,000	-	-	-	-	15,000	225.000,000	8,878	155.365,000	150,028	8.580.115,000
2	Bluto	69.946,873	279.787.492,000	14,282	928.330,000	-	-	-	-	-	-	6,105	106.837,500	69.967,260	280.822.659,500
3	Saronggi	66.278,941	265.115.764,000	20,010	1.300.650,000	-	-	-	-	25,000	375.000,000	9,283	162.452,500	66.333,234	266.953.866,500
4	Giligenting	60.165,002	240.660.008,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.165,002	240.660.008,000
5	Talango	28.130,438	62.568.285,000	21,117	1.372.605,000	-	-	-	-	-	-	-	-	28.151,555	63.940.890,000
6	Kalianget	-	-	132,200	8.593.000,000	-	-	-	-	125,000	1.875.000,000	-	-	257,200	10.468.000,000
7	Sumenep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,559	359.782,500	20,559	359.782,500
8	Batuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,120	212.100,000	12,120	212.100,000
9	Lenteng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200	126.000,000	7,200	126.000,000
10	Ganding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,293	75.127,500	4,293	75.127,500
11	Guluk-Guluk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	35.000,000	2,000	35.000,000

**Review Rencana Strategis (Renstra)**

**Tahun 2016-2021**



12	Pasongsongan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Ambunten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,207	178.622,500	10,207	178.622,500
14	Rubaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,165	212.887,500	12,165	212.887,500
15	Dasuk	-	-	23,420	1.522.300,000	-	-	-	-	-	-	8,000	140.000,000	31,420	1.662.300,000
16	Manding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Batuputih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000	157.500,000	9,000	157.500,000
18	Gapura	2.280,388	9.121.552,000	29,800	1.937.000,000	-	-	-	-	175,000	2.625.000,000	13,250	231.875,000	2.498,438	13.915.427,000
19	Batang-Batang	-	-	22,173	1.441.245,000	-	-	-	-	-	-	-	-	22,173	1.441.245,000
20	Dungkek	1.898,219	7.592.876,000	358,100	23.276.500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.256,319	30.869.376,000
21	Nonggunong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Gayam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Raas	116.418,820	465.675.280,000	-	-	-	-	12,000	10.800.000,000	-	-	-	-	116.430,820	476.475.280,000
24	Sapeken	173.912,756	695.651.024,000	-	-	-	-	21,428	19.285.200,000	-	-	-	-	173.934,184	714.936.224,000
25	Arjasa	11.390,933	45.563.732,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.390,933	45.563.732,000
26	Kangayan	-	-	-	-	4,200	567.000,000	-	-	960,000	14.400.000,000	-	-	964,200	14.967.000,000
27	Masalembu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Produksi</b>		<b>530.422,37</b>	<b>2.071.736.013,00</b>	<b>747,25</b>	<b>48.571.380,00</b>	<b>4,20</b>	<b>567.000,00</b>	<b>33,43</b>	<b>30.085.200,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>123,06</b>	<b>2.153.550,00</b>	<b>532.630,31</b>	<b>2.172.613.143,00</b>



Tabel. Data Produksi Garam Kabupaten Sumenep Tahun 2017

NO	KECAMATAN	DESA	PRODUKSI
			(Ton)
1	2	3	4
1	Saronggi	Nambakor	18.288,820
		Kebundadap Barat	12.263,050
		Saroka	65,700
		Tanjung	204,490
		Kebundadap Timur	2.233,950
		<b>JUMLAH PER KECAMATAN</b>	<b>33.056,010</b>
2	Pragaan	Pragaan Laok	5.830,080
		Jaddung	6.328,600
		Pakamban Laok	8.162,450
		Sentol Daya	2.172,800
		Sendang	1.000,000
		<b>JUMLAH PER KECAMATAN</b>	<b>23.493,930</b>
3	Gapura	Gersik Putih	7.902,000
		Andulang	737,000
		Gapura Tengah	267,000
		Banjar Timur	424,230
		Karangbudi	7.603,000
		<b>JUMLAH PER KECAMATAN</b>	<b>18.163,230</b>
4	Gili Genting	Galis	14.600,0
		Gedugen	14.611,000
		Lombang	4.507,330
		Banmaleng	320,000
		Banbaru	8.123,400
		<b>JUMLAH PER KECAMATAN</b>	<b>42.161,730</b>
5	Kalianget	Karanganyar	28.027,210
		Marengan Laok	8.621,000
		Pinggirpapas	36.664,050
		Kertasada	30.642,200
		Kalimo'ok	230,000
		<b>JUMLAH PER KECAMATAN</b>	<b>104.184,460</b>
6	Ra'as	Kropoh	6.520,000
		Alas Malang	597,000
		Karang Nangka	1.011,000
		Jungkat	192,000
		<b>JUMLAH PER KECAMATAN</b>	<b>8.320,000</b>
7	Sapeken	Paliat	1.338,345
		Sabuntan	1.146,052
		<b>JUMLAH PER KECAMATAN</b>	<b>2.484,397</b>
8	Arjasa	Pajanangger	-
		Gelaman	529,533
		Buddhi	-
		<b>JUMLAH PER KECAMATAN</b>	<b>529,169</b>



9	Kangayan	Saobi	-
		Batu Putih	-
		Cangkramaan	-
		<b>JUMLAH PER KECAMATAN</b>	-
<b>Total Produksi</b>			<b>232.393,29</b>

Produksi rumput laut merupakan komoditas yang terbesar di Kabupaten Sumenep pada tahun 2017 mencapai 530.422,37 ton basah dengan nilai produksi sebesar 2.071.763.013. Komoditas rumput laut merupakan komoditas unggulan budidaya perikanan dalam perencanaan RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2016-2018. Sepanjang tahun 2017 terjadi cuaca ekstrim (salinitas air yang tinggi, peningkatan suhu laut, angin kencang dan gelombang besar ) yang menyebabkan budidaya rumput laut mengalami penurunan produksi. Selain faktor teknis tersebut, hal ini juga disebabkan oleh faktor non teknis yaitu adanya penurunan harga rumput laut terutama pada triwulan I sampai triwulan III. Dengan adanya cuaca ekstrim dan ketidak stabilan tersebut, banyak pembudidaya rumput laut berhenti dan pindah pekerjaan yang dianggap lebih menghasilkan antara lain melakukan urbanisasi ke Kota - Kota besar seperti Jakarta.

Produksi terbesar kedua setelah rumput laut yaitu produksi garam rakyat yang mencapai produksi sebesar 232.392,39 ton. Produksi Garam terdiri dari garam rakyat (PUGAR), Non PUGAR dan PT. Garam. Meningkatnya dan menurunnya produksi garam rakyat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya :

- Cuaca pada tahun 2017 kurang mendukung (Kemarau Basah). Pada saat hampir musim panen garam yaitu sekitar bulan Agustus terjadi hujan di Kabupaten Sumenep, sehingga garam yang sudah hampir panen mencair kembali;
- Belum adanya implementasi teknologi untuk produksi pada waktu musim kemarau basah;



- Kualitas garam yang dihasilkan petambak garam rakyat baik kelompok dan koperasi garam kurang solid dan aktif.

Komoditas kerapu bebek merupakan produksi terendah dengan produksi sebesar 0,2 ton dan nilai produksi sebesar 105.000. Rendahnya komoditas kerapu bebek dikarenakan hanya diperoleh dari hasil tangkapan nelayan di laut dan belum ada pengembangan sentra budidaya kerapu (baik kerapu bebek, kerapu sunu maupun kerapu macan) di Kabupaten Sumenep. Kondisi perairan laut di Kabupaten Sumenep sangat mendukung terhadap pengembangan usaha budidaya kerapu apalagi potensi lahan perairan laut sangat luas, sehingga perlunya pengembangan budidaya kerapu sebagai komoditi dalam meningkatkan produksi budidaya Perikanan Kabupaten Sumenep.

#### **b. Peluang**

Melihat potensi sumber daya kelautan dan perikanan Kabupaten Sumenep yang begitu besar, selain merupakan tantangan besar untuk mengelola sumberdaya tersebut juga menjadi peluang terbesar dalam mengembangkan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Sumenep diantaranya yaitu :

- Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya;
- Meningkatkan konsumsi ikan masyarakat;
- Meningkatkan produk sumberdaya laut unggulan seperti rumput laut;
- Pemberdayaan kelompok nelayan;
- Menciptakan wirausaha baru bidang Perikanan;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas garam rakyat.



## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS SKPD

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perikanan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan SKPD sebagai berikut :

##### a. Faktor Internal

- Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi relatif masih terbatas;
- Proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan belum berjalan secara maksimal;
- Ketersediaan data dan informasi berbasis IT kurang memadai;
- Terbatasnya dana untuk pengadaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana.

##### b. Faktor Eksternal

- Belum beroperasinya TPI Pasongsongan sebagai tempat untuk kegiatan pemasaran dengan sistem lelang;
- Kurangnya penguatan kelembagaan Nelayan dan Masyarakat Pesisir;
- Rendahnya kesadaran pemilik kapal untuk melengkapi surat dokumen kapal secara resmi;
- Sulitnya bibit rumput laut yang berkualitas;
- Rendahnya kesadaran nelayan untuk mengasuransikan keselamatan dirinya;
- Masih rendahnya kesadaran kelompok nelayan untuk mendaftarkan kelompoknya agar berbadan hukum.



### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

#### a. Visi :

*"Sumenep makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional".*

#### b. Misi :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang Didukung Pengelolaan SDA serta Lingkungan;
3. **Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi;**
4. Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan *Accountable*;
5. Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat serta *Stakeholder* Dalam Proses Pembangunan;
6. Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan, budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

#### c. Tujuan

- 1) Tujuan dari misi 1 adalah :
  - a. Meningkatkan pemerataan pendidikan dan perluasan akses pendidikan (WAJAR DIKDAS) 9 tahun tercapai;
  - b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
  - c. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan.



- 2) Tujuan dari misi 2 adalah :
  - a. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dan jaringan transportasi di daratan dan wilayah kepulauan;
  - b. Menurunkan disparitas ketersediaan infrastruktur antara wilayah kepulauan dan daratan;
  - c. Meningkatkan efektifitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup berkelanjutan.
- 3) Tujuan dari misi 3 adalah :
  - a. Meningkatkan kegiatan ekonomi dan kualitas kelembagaan UMKM dan Koperasi dan pengembangan wisata daerah;
  - b. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian untuk mendukung ketahanan pangan daerah;
  - c. Meningkatkan kinerja penanaman modal/ investasi daerah, Industri dan Perdagangan.
- 4) Tujuan dari misi 4 adalah :
  - a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
  - b. Mewujudkan kultur dan tata pemerintahan yang tertib dan akuntabel.
- 5) Tujuan dari misi 5 adalah :
  - a. Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam perencanaan pembangunan;
  - b. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan perlindungan masyarakat.
- 6) Tujuan dari misi 6 adalah :
  - a. Meningkatkan kualitas nilai-nilai kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama yang dilandasi dengan semangat nasionalisme;
  - b. Meningkatkan penguatan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat melalui pemberdayaan seni, budaya, pemuda dan olahraga.



### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Perikanan RI dan Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur

#### a. Renstra Kementerian Perikanan RI

Sesuai dengan RPJMN tahun 2015-2019, Kementerian Perikanan RI mempunyai Sasaran yaitu "*Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional*" yang ditandai oleh :

1. Terbangunnya jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia;
2. Meningkatkan dan menguatnya SDM di bidang kelautan yang didukung pengembangan IPTEK;
3. Ditetapkannya wilayah Negara kesatuan NKRI, aset dan hal-hal yang terkait dalam kerangka ketahanan Negara;
4. Terbangunnya ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan;
5. Berkurangnya dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.

Arah kebijakan untuk mendukung Sasaran :

- Membangkitkan wawasan dan budaya bahari;
- Meningkatkan dan menguatkan SDM dibidang kelautan;
- Menetapkan wilayah kesatuan NKRI, aset dan hal-hal terkait didalamnya termasuk kewajiban yang telah digariskan oleh hukum laut unclos;
- Melakukan upaya pengamanan wilayah kedaulatan yuridiksi dan aset NKRI;
- Mengembangkan industri kelautan secara sinergi, optimal dan berkelanjutan;
- Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut;
- Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir.



#### **b. Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur**

Sesuai rencana strategis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, pembangunan perikanan dan kelautan meliputi pengelolaan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, industri kelautan (seperti industri maritim, perikanan, wisata bahari) yang dikembangkan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan. Untuk mensinergikan rencana strategis tersebut dengan rencana strategis Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, ada beberapa faktor penghambat yang perlu ditangani sehingga renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur bisa disinergikan secara optimal, yakni kurangnya sumber daya manusia yang menguasai teknologi dan berbasis teknologi sehingga pembangunan berbasis agroindustri akan terhambat.

Namun demikian Kabupaten Sumenep mempunyai potensi SDA kelautan yang melimpah yang membutuhkan sentuhan dan pengelolaan yang optimal, dan ini merupakan faktor pendorong untuk mensinergikan antara renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dengan renstra Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Sumenep didasarkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumenep tahun 2013-2033 yaitu sebagai pusat kawasan minapolitan yang didukung dengan pengembangan kawasan agropolitan, pariwisata, dan industri, sehingga mampu mendorong kemandirian dan daya saing daerah tanpa melupakan perlindungan dan kelestarian sumber daya alam. Adapun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Sumenep meliputi :

- a. Pengembangan kawasan minapolitan;
- b. Pengembangan kawasan agropolitan;



- c. Pengembangan dan peningkatan kawasan pariwisata;
- d. Pengembangan kegiatan industri;
- e. Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah;
- f. Pengendalian dan pengelolaan fungsi kawasan lindung;
- g. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana melalui pengelolaan fungsi kawasan lindung;
- h. Pengembangan kawasan budidaya sesuai daya dukung lingkungan;
- i. Pengembangan potensi pertambangan mineral dan non mineral;
- j. Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kluster kewilayahan ditetapkan menjadi dasar sasaran kebijakan pengembangan kewilayahan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya di Kabupaten Sumenep. Penetapan cluster dirumuskan berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumenep 2013-2033, utamanya Kawasan strategis Minapolitan, kawasan Agropolitan, kawasan Pariwisata, dan kawasan Industri.

Dalam rangka penerapan kebijakan tata ruang (spatial) guna mensukseskan pemerataan pembangunan di Kabupaten Sumenep, berdasarkan Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) beserta serangkaian kegiatan utama yang perlu mendapatkan perhatian terutama dari sektor Perikanan krena memiliki keunggulan yang komperatif, maka wilayah kecamatan yang menjadi konsen pembangunan Perikanan dari Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep adalah :

1. Wilayah Pembangunan Sulang Pusaka yang meliputi Kecamatan Talango, Gapura, Saronggi dan Kalianget untuk kegiatan perikanan tangkap, budidaya laut (minapolitan budidaya rumput laut) dan payau, pengolahan hasil perikanan serta penggaraman;



2. Wilayah Pembangunan Ganding dan sekitarnya yang meliputi Kecamatan Lenteng untuk kegiatan perikanan budidaya tawar;
3. Wilayah Pembangunan Pasongsongan untuk kegiatan perikanan tangkap (minapolitan tangkap);
4. Wilayah Pembangunan Batang-Batang dan sekitarnya yang meliputi Kecamatan Batang-Batang, Batuputih dan Dungkek untuk kegiatan perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan serta penggaraman;
5. Wilayah Pembangunan Pragaan dan sekitarnya yang meliputi Kecamatan Pragaan, Bluto dan Giligenting untuk kegiatan perikanan tangkap, budidaya laut, pengolahan hasil perikanan serta penggaraman;
6. Wilayah Pembangunan Arjasa, Kangayan dan Sapeken untuk kegiatan perikanan tangkap, budidaya laut, pengolahan hasil perikanan;
7. Wilayah Pembangunan Gayam dan sekitarnya, meliputi Kecamatan Gayam, Nonggunong dan Ra'as untuk kegiatan perikanan tangkap, budidaya laut, pengolahan hasil perikanan (handycraft);
8. Wilayah Pembangunan Masalembu untuk kegiatan perikanan tangkap, dan budidaya laut.

Berdasar atas Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) diatas, Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep juga membagi Wilayah Pengelolaan Perikanan Sumenep (WPPS) untuk mempermudah dalam pengelolaan dan pengawasan sumber daya Perikanan dengan pembagian sebagai berikut :

1. Wilayah Pengelolaan Perikanan Sumenep I, yang terdiri dari Kecamatan Pasongsongan, Ambunten, Dasuk, Batang-Batang dan Batuputih;
2. Wilayah Pengelolaan Perikanan Sumenep II, yang terdiri dari Kecamatan Gapura, Dungkek dan Talango;
3. Wilayah Pengelolaan Perikanan Sumenep III, yang terdiri dari Kecamatan Kalianget, Saronggi, Giligenting, Bluto dan Pragaan;



4. Wilayah Pengelolaan Perikanan Sumenep IV, yang terdiri dari Kecamatan Gayam dan Nonggunong;
5. Wilayah Pengelolaan Perikanan Sumenep V, Kecamatan Ra'as;
6. Wilayah Pengelolaan Perikanan Sumenep VI, yang terdiri dari Kecamatan Arjasa dan Kangayan;
7. Wilayah Pengelolaan Perikanan Sumenep VII, Kecamatan Sapeken;
8. Wilayah Pengelolaan Perikanan Sumenep VIII, Kecamatan Masalembu.

### **3.5. Faktor Pendorong dan Penghambat**

#### **a. Faktor Pendorong**

Adapun faktor pendorong bidang Perikanan kabupaten Sumenep sebagai berikut :

- Perlu adanya pendataan infrastruktur di Kepulauan untuk mendukung semua kegiatan sektor Perikanan yang ada di kepulauan;
- Perlu adanya dukungan kemudahan terhadap permodalan bagi nelayan untuk peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi;
- Perlu adanya aparatur fungsional penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
- Perlu adanya peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap kualitas garam yang dibutuhkan oleh konsumen (industri).

#### **b. Faktor Penghambat**

Adapun faktor penghambat bidang Perikanan kabupaten Sumenep sebagai berikut :

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan sehingga masih banyak dijumpai penggunaan alat Bantu penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bahan peledak dan bahan kimia (Potassium Sianida);



- Terindikasi masih adanya nelayan yang menggunakan kompresor sebagai alat bantu penangkapan ikan, meskipun hal tersebut sudah dilarang karena cenderung akan melakukan *illegal fishing*;
- Banyaknya alat tangkap modifikasi yang sistem beroperasinya menyerupai trawl dan melakukan penangkapan ikan di areal nelayan tradisional sehingga sering memunculkan konflik antar nelayan;
- Armada dan Teknologi penangkapannya masih tradisional, sehingga sumber daya perikanan banyak dimanfaatkan oleh nelayan dari luar daerah Kabupaten Sumenep;
- Masih rendahnya serapan garam rakyat oleh pengusaha, karena disamping kualitas yang dihasilkan memiliki kandungan NaCl rendah, juga masih banyaknya garam impor yang beredar di pasaran sehingga berakibat pada rendahnya harga garam rakyat.

### 3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

Potensi sektor Perikanan yang sebetulnya berlimpah di wilayah Kabupaten Sumenep masih belum tergarap maksimal dan nasib nelayan umumnya belum diperlakukan adil, dimana hal itu dibuktikan dari adanya pembagian margin keuntungan yang lebih banyak dinikmati pedagang perantara/tengkulak daripada nelayan sebagai produsen. Adapun isu-isu strategis yang dapat teridentifikasi adalah :

#### a. Isu Lingkungan

Isu yang muncul pada isu lingkungan merupakan indikasi dibutuhkannya tindakan rehabilitasi dalam menjaga sumberdaya perikanan dan kelautan di Kabupaten Sumenep. Isu-isu yang teridentifikasi adalah :

- Overfishing akibat dari kegiatan penangkapan ikan yang terkonsentrasi pada daerah pantai;



- Penggunaan bahan peledak dan kimia dalam kegiatan penangkapan;
- Penggunaan obat-obatan pada kegiatan budidaya ikan yang membahayakan;
- Penggunaan alat tangkap ikan yang merusak lingkungan seperti cantrang, trawl dan sejenisnya;
- Masih maraknya pencurian terumbu karang dan penebangan mangrove;
- Konflik antar nelayan (nelayan skala besar dengan nelayan skala kecil/tradisional), antara nelayan pendatang dan nelayan setempat.

**b. Isu Kebijakan**

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan Pemerintah Daerah urusan bidang pengelolaan bidang pengawasan laut dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil beralih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, sehingga kewenangan Pemerintah Kabupaten Daerah menjadi lebih terbatas yaitu :

- Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten;
- Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- Pemberdayaan dan pengelolaan usaha kecil pembudidayaan ikan air tawar dan air payau.

**c. Isu Kelembagaan**

Isu kelembagaan kelompok perikanan yang teridentifikasi adalah :

- Masih rendahnya minat Penguatan kelembagaan kelompok nelayan (KUB/Pokdakan) dalam upaya mendaftarkan kelompoknya untuk berbadan hukum;
- Rendahnya pemahaman hukum masyarakat sektor Perikanan serta penegakannya;
- Perlunya penguatan kapasitas UPT Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pasongsongan;



- Perlunya penguatan kapasitas kelompok usaha bidang perikanan.

**d. Isu Infrastruktur**

Pada isu kelompok infrastruktur teridentifikasi isu terkait minimnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan produksi, sistem informasi, dan distribusi hasil tangkapan, tidak efisiennya proses produksi dan distribusi hasil tangkapan. Secara detail, isu yang teridentifikasi mencakup :

- Minimnya sarana dan prasarana di wilayah kepulauan;
- Rendahnya penyediaan sarana dan prasarana budidaya ikan dan udang serta kegiatan garam rakyat.

**e. Isu Ketahanan Pangan**

Isu ini muncul di bidang budidaya perikanan dikarenakan untuk mewujudkan ketahanan pangan, diperlukan adanya peningkatan produksi dari budidaya perikanan sebagai tumpuan utama. Isu-isu yang teridentifikasi :

- Harga komoditas fluktuatif, nelayan/ pembudidaya ikan/ petambak garam cenderung berada dalam kondisi ketidakpastian usaha;
- Masih tingginya harga pakan yang berimbas terhadap tingginya ongkos produksi budidaya;
- Perlunya pengembangan budidaya ikan skala kecil/ rumah tangga dan penataan pemasaran;
- Terbatasnya ketersediaan induk unggul dan benih bermutu terutama budidaya air tawar, laut dan payau serta rumput laut;
- Masih bergantungnya pemenuhan bibit dari alam khususnya pada kegiatan budidaya laut.



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep harus bertumpu pada Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 yang sesuai dengan bidang Perikanan yaitu :

**Visi :**

*"Sumenep makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional".*

**Misi :**

2. Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi.

### **4.1 Tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep**

Adapun Tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan;
2. Meningkatnya Produksi Perikanan.

Dari Tujuan tersebut, ditentukan dalam Indikator Tujuan diantaranya yaitu :

1. Nilai Tukar Nelayan;
2. Produksi Hasil Perikanan.

### **4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep**

Dari Tujuan tersebut diatas, Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep yang ingin dicapai adalah :

1. Jumlah Pendapatan Nelayan per-Kapita;
2. Jumlah Kelompok Perikanan yang Berhasil dibina dan Berbadan Hukum (klpk);



3. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya.

Dari Sasaran tersebut, ditentukan dalam Indikator Sasaran diantaranya yaitu :

1. Jumlah Pendapatan Nelayan per-Kapita;
2. Jumlah Kelompok Perikanan yang Berhasil dibina dan Berbadan Hukum (klpk);
3. Produksi Perikanan :
  - a. Produksi Hasil Perikanan Tangkap;
  - b. Produksi Hasil Perikanan Budidaya.

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran**  
**Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1. Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan.	1. Nilai Tukar Nelayan	1. Meningkatnya Pendapatan Nelayan 2. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kelompok Perikanan	1. Jumlah Pendapatan Nelayan per-Kapita 2. Jumlah Kelompok Perikanan yang Berhasil dibina dan Berbadan Hukum (klpk)
2. Meningkatnya Produksi Perikanan	2. Produksi Hasil Perikanan	3. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	3. Produksi Perikanan : a. Produksi Hasil Perikanan Tangkap b. Produksi Hasil Perikanan Budidaya



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep

##### a. Strategi

Berdasarkan Sasaran yang telah ditetapkan diatas, perlu dipertegas dengan upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui arah strategi dan kebijakan pembangunan bidang Perikanan Kabupaten Sumenep dalam 3 (tiga) tahun kedepan, yaitu :

- 1) Meningkatkan Kemampuan Pelaku Usaha Perikanan;
- 2) Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Kelompok Perikanan;
- 3) Meningkatkan Hasil Perikanan Tangkap dengan Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
- 4) Meningkatkan Hasil Perikanan Budidaya dengan Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

##### b. Kebijakan

Melalui strategi mengembangkan ekonomi berbasis perikanan tersebut diatas, ditentukan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Pemberdayaan dan Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan;
- 2) Memberdayakan Kelembagaan Kelompok Perikanan;
- 3) Meningkatkan dan Mengembangkan Produksi Perikanan Tangkap secara Efisien dan Lestari;
- 4) Mengembangkan Perikanan Budidaya yang mempunyai Daya Saing dan Berwawasan Lingkungan.



## **BAB VI**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **6.1 Rencana Program**

Arah kebijakan dan strategi Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 yang telah diuraikan tersebut akan diimplementasikan kedalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan inventarisasi program dan kegiatan sebagai berikut :

#### **a. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor;
- Penyediaan Kebutuhan Bahan Perkantoran;
- Penyediaan Komponen Instansi Listrik / Penerangan Gedung Kantor;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- Penyediaan Makanan dan Minuman;
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi;
- Peringatan Hari - Hari Besar;
- Operasional UPTD;
- Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran;
- Pembangunan Rumah Dinas / Jabatan;
- Pembangunan Gedung Kantor;
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional;
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor / Rumah Dinas;
- Rehabilitasi Gedung Kantor / Rumah Dinas;
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor / Rumah Dinas;



- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional;
  - Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor / Rumah Dinas.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
- Pendidikan dan Pelatihan Formal;
  - Pengelolaan dan Peningkatan Disiplin Kepegawaian.
- c. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
- Penyusunan Laporan Keuangan;
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah;
  - Pengembangan Sistem Informasi Manajemen.
- d. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan**
- Pemberdayaan Masyarakat Nelayan;
  - Optimalisasi Perlindungan Nelayan;
  - Optimalisasi Usaha Pemanfaatan Ikan.
- e. Program Pembinaan Lingkungan Sosial**
- Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja.
- f. Program Pengembangan Kelembagaan dan Pendataan serta Pengendalian Usaha Perikanan**
- Optimalisasi Kelembagaan Perikanan;
  - Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan;
  - Informasi dan Promosi Hasil Perikanan.
- g. Program Pengembangan Perikanan Tangkap**
- Optimalisasi Pemulihan Sumberdaya Perikanan Tangkap;
  - Optimalisasi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
  - Penerapan Teknologi Penangkapan Ikan.



**h. Program Pengembangan Budidaya Perikanan**

- Optimalisasi Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan;
- Optimalisasi Teknis Budidaya Perikanan;
- Optimalisasi Usaha Perikanan Budidaya.

Adapun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep tersebut diatas akan diimplementasikan pada program dan kegiatan selama 3 (tiga) tahun kedepan berupa Indikator Kinerja sebagaimana terlampir.



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **7.1 Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang mengacu pada Review RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021, maka Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep telah menetapkan Indikator Kinerja Utama bidang urusan Kelautan dan Perikanan selama 3 (tiga) tahun kedepan sebagai berikut :

##### **1. Nilai Tukar Nelayan**

###### **a. Jumlah Pendapatan Masyarakat Nelayan per-Kapita**

Untuk mendukung peningkatan jumlah pendapatan masyarakat nelayan per-kapita, perlu diprogramkan bantuan kepada masyarakat nelayan sebagai berikut :

###### **1) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan**

- Pemberdayaan Masyarakat Nelayan;
- Optimalisasi Perlindungan Nelayan;
- Optimalisasi Usaha Pemanfaatan Ikan.

###### **2) Program Pembinaan Lingkungan Sosial**

- Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja.



**b. Jumlah Kelompok Perikanan yang berhasil dibina dan Berbadan Hukum**

Sedangkan untuk mendukung peningkatan jumlah kelompok perikanan yang berhasil dibina dan berbadan hukum, perlu diprogramkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

**1) Program Pengembangan Kelembagaan dan Pendataan serta Pengendalian Usaha Perikanan**

- Optimalisasi Kelembagaan Perikanan;
- Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan;
- Informasi dan Promosi Hasil Perikanan.

**2. Produksi Hasil Perikanan**

**a. Perikanan Tangkap**

Untuk mendukung peningkatan produksi hasil perikanan tangkap, perlu diprogramkan bantuan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan sebagai berikut :

**1) Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

- Optimalisasi Pemulihan Sumberdaya Perikanan Tangkap;
- Optimalisasi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
- Penerapan Teknologi Penangkapan Ikan.

**b. Perikanan Budidaya**

Sedangkan untuk mendukung peningkatan produksi hasil perikanan budidaya, perlu diprogramkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

**1) Program Pengembangan Perikanan Budidaya**

- Optimalisasi Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan;
- Optimalisasi Teknis Budidaya Perikanan;
- Optimalisasi Usaha Perikanan Budidaya.



Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dalam Review RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 dengan Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada lampiran.



## BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 Dinas Perikanan merupakan dokumen perencanaan bidang Perikanan mencakup 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta bersifat indikatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Diharapkan nantinya dokumen Renstra dapat dijadikan pedoman Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan program pembangunan bidang Perikanan 5 (lima) tahunan secara sinergi dan berjenjang untuk meningkatkan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.

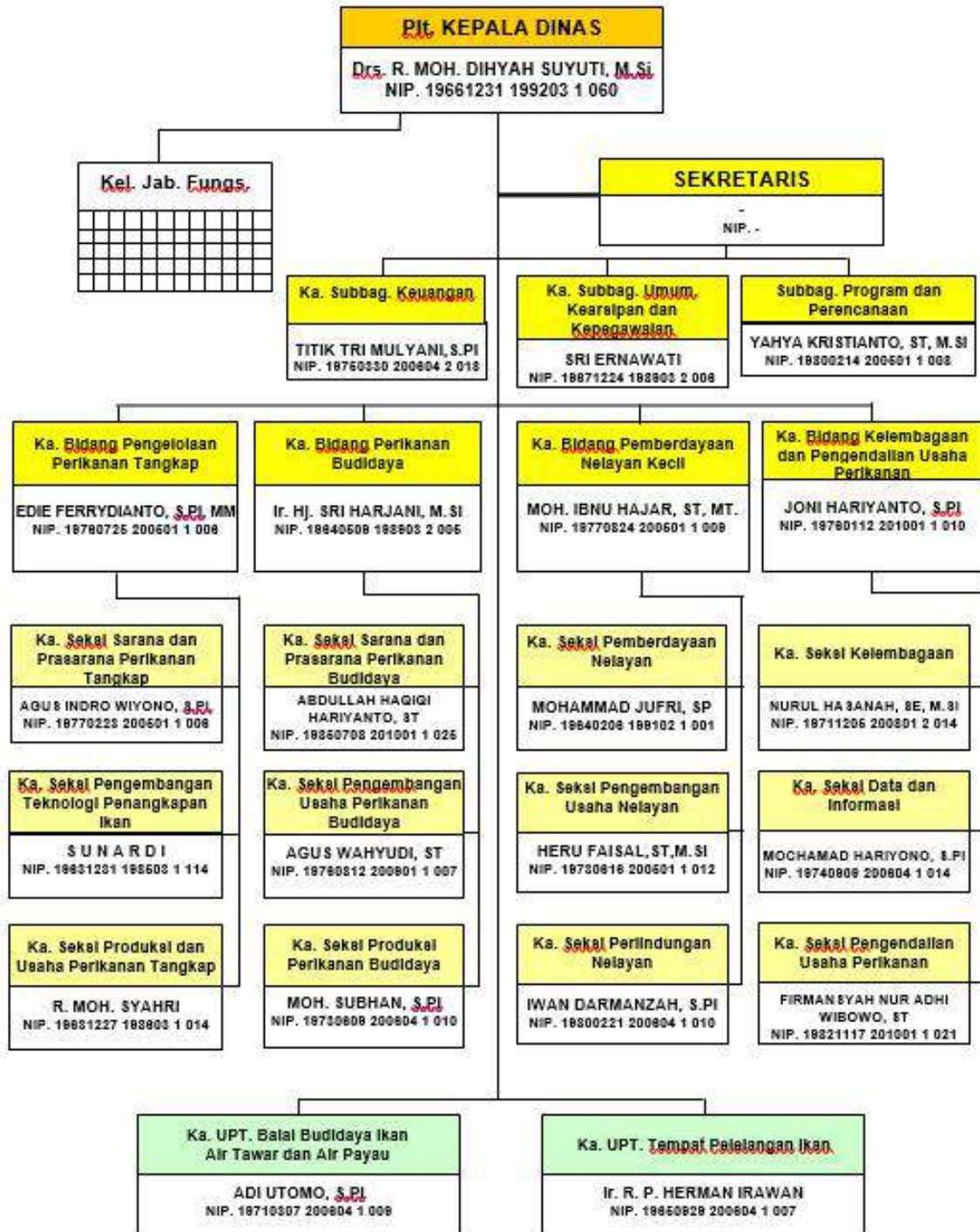
Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan Perikanan di Kabupaten Sumenep tidak hanya ditentukan dengan adanya perencanaan yang matang, melainkan juga diperlukan dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat luas. Akhirnya, kebersamaan dan kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep dengan semua pihak yang terkait diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk mensejahterakan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya secara berkelanjutan dapat terwujud.



# Lampiran

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUMENEP**  
**TAHUN 2020**

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2020**



**REVIEW RENSTRA 2016 - 2021**  
**DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUMENEP**

**PENYELARASAN RENCANA STRATEGI PERANGKAT DAERAH DENGAN RPJMD PEMKAB. SUMENEP  
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUMENEP**

Tabel 1

No	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI RPJMD	KERJAKAN RPJMD
1							
2	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Perikanan Dengan Memberikan Perikanan Ekowisata yang Unggul Berdaya Saing Tinggi	Meningkatkan Perikanan Daerah	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	1. Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan 2. Meningkatkan Produksi Perikanan dan Perikanan	1. Nilai Tukar Nelayan 2. Produksi Hasil Perikanan (Ton)	1.1.2. Mengembangkan ekonomi berbasis perikanan 1.2.2. Mengembangkan ekonomi berbasis perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan	Pengembangan usaha perikanan berbasis perikanan guna pengembangan pendapatan nelayan Pengembangan produksi perikanan berbasis perikanan dan memunculkan kewirausahaan perikanan dan memunculkan kewirausahaan usaha perikanan

**RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Tabel 2

No.	TUJUAN *)	INDIKATOR TUJUAN **)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)
1										
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	Meningkatnya Pendapatan Nelayan	Jumlah Pendapatan Nelayan per-Kapita	Meningkatkan Kemampuan Pelaku Usaha Perikanan	Pemberdayaan dan Perindungan Pelaku Usaha Perikanan	Program Pemberdayaan dan Perindungan Pelaku Usaha Perikanan	Prosentase Pelaku Usaha Perikanan yang Mandiri	1. Pembudayaan Masyarakat Nelayan 2. Optimalisasi Perindungan Nelayan 3. Optimalisasi Usaha Pemanfaatan Ikan	Jumlah Masyarakat Nelayan yang Meningkatkan Usaha dan Keterampilannya Jumlah Masyarakat Nelayan yang Mendapat Perindungan Usaha Jumlah Konsumsi Ikan
							Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Jumlah Masyarakat Perikanan yang Terampil dan Terbina Usahanya	1. Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah Masyarakat Perikanan yang Terampil dan Terbina
							Program Pengembangan Kelembagaan dan Pendidikan serta Pengendalian Usaha Perikanan	Prosentase Peningkatan Kelembagaan Perikanan yang Berbadan Hukum	1. Optimalisasi Kelembagaan Perikanan	Jumlah Peningkatan Kelembagaan Perikanan yang terfasilitasi
									2. Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	Jumlah pebku usaha perikanan yang pebah penundang-undangan
									3. Informasi dan Promosi Hasil Perikanan	Jumlah data produksi dan promosi hasil pembangunan perikanan

No.	TUJUAN '1)	INDIKATOR TUJUAN '2)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Meningkatnya Produktifitas Perikanan	Produktifitas Perikanan (Ton)	Meningkatnya Produktifitas Perikanan Tangkap dan Budidaya	Produktifitas Perikanan : a. Produktifitas Perikanan Tangkap (Ton) b. Produktifitas Budidaya (Ton)	Meningkatkan Hasil Perikanan Tangkap dengan Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemasaran Produktifitas Perikanan	Mengembangkan dan Meningkatkan Produktifitas Perikanan Tangkap secara Efisien dan Lestari	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Prosentase Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap	1. Optimalisasi Pemulihan Sumberdaya Perikanan Tangkap 2. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 3. Penerapan Teknologi Penangkapan Ikan	Jumlah Kegiatan Pemulihan Sumberdaya Perikanan Tangkap Jumlah Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan yang Layak Jumlah Alat Barut Teknologi Penangkapan Ikan
					Meningkatkan Hasil Perikanan Budidaya dengan Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemasaran Produktifitas Perikanan	Mengembangkan Perikanan Budidaya yang Mempunyai Daya Saling dan Berwawasan Lingkungan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Prosentase Peningkatan Produktifitas Perikanan Budidaya	1. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan 2. Optimalisasi Teknis Budidaya Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan yang Layak Jumlah Kegiatan Teknis Budidaya Perikanan
									3. Optimalisasi Usaha Perikanan Budidaya	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Budidaya



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN SUMENEP

INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	2019		2020		2021	
				TARGET	(RIBU) JUZA	TARGET	(RIBU) JUZA	TARGET	(RIBU) JUZA
				5	6	7			
Jumlah Pendapatan Masyarakat Nelayan per-Kapita	Program Pembedayaan dan Perindungan Pelaku Usaha	<p>1. Pembedayaan Masyarakat Nelayan yang Meningkatkan Usaha dan Keterampilannya</p> <p>2. Optimalisasi Perindungan Masyarakat Nelayan yang Mendapat Perindungan Usaha</p> <p>3. Optimalisasi Usaha Pemaksimalan Ikan</p>	<p>Meningkatnya Pendapatan Nelayan di Kabupaten Sumenep</p> <p>Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang Mandiri</p> <p>Jumlah Masyarakat Nelayan yang Meningkatkan Usaha dan Keterampilannya</p> <p>Jumlah Masyarakat Nelayan yang Mendapat Perindungan Usaha</p> <p>Jumlah Konsumsi Ikan</p> <p>Jumlah Masyarakat Perikanan yang Terampil dan Terbina Ushahnya</p> <p>Jumlah Masyarakat Perikanan yang Terampil dan Terbina</p>	26.466,466	7.230,000	28.753,583	8.690,000	31.934,903	9.150,000
				1139 Orang	4.730,000	1139 Orang	5.690,000	1139 Orang	5.650,000
				109 Orang	2.050,000	109 Orang	2.340,000	109 Orang	2.560,000
				260 Orang	490,000	260 Orang	600,000	260 Orang	700,000
				750 Orang	2.190,000	750 Orang	2.750,000	750 Orang	2.390,000
				60 Orang	2.500,000	75 Orang	3.000,000	100 Orang	3.500,000
				60 Orang	2.500,000	75 Orang	3.000,000	75 Orang	3.500,000
				160	1.730,000	170	1.968,000	170	2.219,800
				15%	1.730,000	20%	1.968,000	20%	2.219,800
				215 Kelompok	240,000	220 Kelompok	264,000	225 Kelompok	290,400
Jumlah Kelompok Perikanan yang Berhasil dibina & Berbadan Hukum (kpk)	Program Pengembangan Kelembagaan dan Pendidikan serta Penguasaan Usaha Perikanan	<p>1. Optimalisasi Kelembagaan Perikanan</p> <p>2. Penguasaan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan</p> <p>3. Informasi dan Promosi Hasil Perikanan</p>	<p>Kelembagaan Perikanan yang terampil</p> <p>Jumlah pelaku usaha perikanan yang patuh perundang-undangan</p> <p>Jumlah Informasi Data Perikanan dan Promosi Hasil Pemanfaatan Perikanan</p>	215 Kelompok	240,000	220 Kelompok	264,000	225 Kelompok	290,400
				275 Pelaku Usaha	715,000	275 Pelaku Usaha	851,500	275 Pelaku Usaha	991,650
				5 Kegiatan	775,000	5 Kegiatan	852,500	5 Kegiatan	937,750

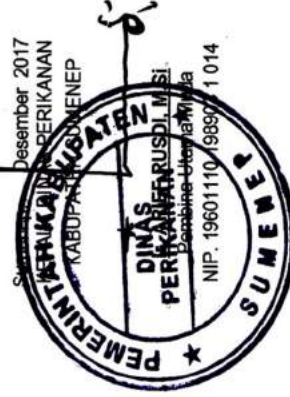
CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN									
INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	2019		2020		2021	
				TARGET	(Rp) Juta	TARGET	(Rp) Juta	TARGET	(Rp) Juta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produksi Perikanan : a. Produksi Hasil Perikanan Tangkap (Ton)	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	1. Optimalisasi Pemulihan Sumberdaya Perikanan Tangkap 2. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 3. Penerapan Teknologi Penangkapan Ikan	Tersedianya sarana dan prasarana perikanan tangkap yang berwawasan lingkungan Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Jumlah Kegiatan Pemulihan Sumberdaya Perikanan Tangkap Jumlah Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan yang Layak Jumlah Alat Bantu Teknologi Penangkapan Ikan Tersedianya sarana dan prasarana perikanan budidaya Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Jumlah Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan yang Layak Jumlah Kegiatan Teknis Budidaya Perikanan Jumlah Pelaku Usaha Pembudidaya Perikanan	48.600	12.470,000	49.000	14.065,000	49.500	15.525,000
				0,52%	12.470,000	0,41%	14.065,000	0,51%	15.525,000
				14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan		
				332 Paket	7.800,000	332 Paket	8.720,000	332 Paket	9.725,000
				265 Paket	2.020,000	265 Paket	2.175,000	265 Paket	2.330,000
				1.517	6.480,000	1.544	7.450,000	1.575	8.490,000
				0,83%	6.480,000	0,88%	7.450,000	0,89%	8.490,000
				44 Paket	2.240,000	55 Paket	2.685,000	65 Paket	3.050,000
				15 Kegiatan	1.475,000	15 Kegiatan	1.700,000	15 Kegiatan	1.800,000
				525 Pelaku Usaha	2.765,000	525 Pelaku Usaha	3.065,000	525 Pelaku Usaha	3.640,000
b. Produksi Hasil Perikanan Budidaya (Ton)	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan 2. Optimalisasi Teknis Budidaya Perikanan 3. Optimalisasi Usaha Perikanan Budidaya							



KENSTRA PERANGKAT DAERAH

No.	TUJUAN *)	INDIKATOR TUJUAN **)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBLUAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Meningkatnya Sarana Layanan Perikanan	Hasil Survey Kepuasan Aparatur	Membangun Manajemen Operasional dan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dengan Arah Kebijakan Pelaksanaan Manajemen Operasional dan Sumber Daya Aparatur dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan	Melaksanakan manajemen operasional dan sumber daya aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan jasa surat menyurat</li> <li>2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</li> <li>3. Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor</li> <li>4. Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran</li> <li>5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</li> <li>6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</li> <li>7. Penyediaan makanan dan minuman</li> <li>8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi</li> <li>9. Peningkatan Hari-Hari Besar</li> <li>10. Operasional UPTD</li> <li>11. Penyediaan Jasa Layanan Perumtaran</li> <li>12. Pembangunan rumah Dinas/jabatan</li> <li>13. Pembangunan gedung kantor</li> <li>14. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional</li> <li>15. Pengadaan Perabotan dan Perengkuapan Gedung Kantonumuh dinas</li> <li>16. Rehabilitasi Gedung Kantonumuh dinas</li> <li>17. Pemeliharaan rutin/bekala gedung kantonumuh dinas</li> <li>18. Pemeliharaan rutin/bekala kendaraan dinas/operasional</li> <li>19. Pemeliharaan rutin/bekala perabotan dan perengkuapan gedung kantonumuh dinas</li> </ol>	<p>Jumlah Surat menyurat yang didistribusikan</p> <p>Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</p> <p>Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor</p> <p>Jumlah bahan perkantoran yang disediakan selama 1 TA</p> <p>Jumlah komponen listrik yang dibagikan</p> <p>Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</p> <p>Jumlah tersedianya makanan dan minuman</p> <p>Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi</p> <p>Jumlah kegiatan peningkatan hari-hari besar yang dilaksanakan</p> <p>Jumlah Layanan UPTD yang disediakan</p> <p>Jumlah layanan perumtaran yang disediakan</p> <p>Jumlah rumah dinas/jabatan yang dibangun</p> <p>Jumlah gedung kantor yang dibangun</p> <p>Jumlah Kendaraan Dinas Opr. Yang dibeli</p> <p>Jumlah perabotan dan perengkuapan kantor yang dibeli</p> <p>Jumlah Gedung Kantor yang direhab</p> <p>Jumlah gedung kantor yang dipelihara</p> <p>Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara</p> <p>Jumlah perabotan dan perengkuapan gedung kantor yang dipelihara</p>
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan dan pelatihan Formal</li> <li>2. Pengeleolan dan peningkatan disiplin Kepegawaian</li> </ol>	<p>Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat/Pejabat/teknik</p> <p>Jumlah jenis Pengeleolan Kepegawaian Tepat Waktu</p>
							Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Laporan Keuangan</li> </ol>	<p>Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur</p>

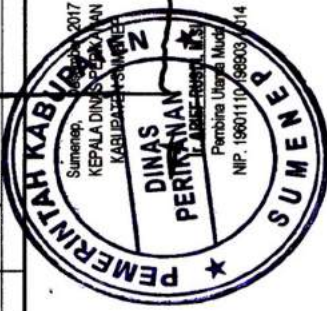
INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN					
				2019		2020		2021	
				Target	(Rp) Juta	Target	(Rp) Juta	Target	(Rp) Juta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		17. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Keg.	91,740	1 Keg.	100,000	1 Keg.	111,000
		18. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	1 Keg.	48,950	1 Keg.	48,950	1 Keg.	53,000
		19. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	1 Keg.	63,250	1 Keg.	64,080	1 Keg.	39,900
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		<b>Prosentase Pengembangan Kompetensi Pegawai</b>	<b>80%</b>	<b>41,150</b>	<b>90%</b>	<b>93,150</b>	<b>100%</b>	<b>195,000</b>
		1. Pendidikan dan pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat/Pelatihan/Bimtek	1 Keg.	18,150	1 Keg.	18,150	1 Keg.	120,000
		2. Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian	Jumlah Jenis Pengelolaan Kepegawaian Tepat Waktu	60 Orang	23,000	60 Orang	75,000	60 Orang	75,000
	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<b>Prosentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu</b>	<b>90%</b>	<b>231,572</b>	<b>95%</b>	<b>237,490</b>	<b>100%</b>	<b>247,140</b>
		1. Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur	2 Keg.	36,672	2 Keg.	38,000	2 Keg.	41,000
		2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	5 Keg.	114,900	5 Keg.	124,490	5 Keg.	131,140
		3. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	1 Keg.	80,000	1 Keg.	75,000	1 Keg.	75,000



**TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
DINAS PERIKAMAN  
KABUPATEN SUMENEP**

INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN					
				2019		2020		2021	
				Target	(Rp) Juta	Target	(Rp) Juta	Target	(Rp) Juta
1	2	3	4	5	6	7			
Hasil Survey Kepuasan Aparatur			Administrasi Perkantoran						
	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi		Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	95%	1.720,280	95%	1.708,900	100%	1.722,695
		1. Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat menyurat yang diadministrasikan	1000 surat	7,838	1000 surat	9,000	1000 surat	12,000
		2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 Rek.	95,304	2 Rek.	104,830	2 Rek.	110,125
		3. Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	1 Keg.	27,500	1 Keg.	30,250	1 Keg.	33,280
		4. Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran	Jumlah bahan perkantoran yang disediakan selama 1 TA	1 Keg.	50,814	1 Keg.	55,880	1 Keg.	61,480
		5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	1 Keg.	16,500	1 Keg.	18,000	1 Keg.	21,000
		6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Eks.	28,292	12 Eks.	35,400	12 Eks.	38,900
		7. Penyediaan makanan dan minuman	jumlah tersedianya makanan dan minuman	1 Keg.	15,180	1 Keg.	20,000	1 Keg.	25,000
		8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	1 Keg.	266,300	1 Keg.	273,000	1 Keg.	285,000
		9. Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	1 Keg.	60,000	1 Keg.	50,000	1 Keg.	50,000
		10. Operasional UPTD	Jumlah Layanan UPTD yang disediakan	20 kec.	42,350	20 kec.	45,000	20 kec.	50,000
		11. Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	jumlah layanan perkantoran yang disediakan	1 Keg.	24,200	1 Keg.	26,000	1 Keg.	28,000
		12. Pembangunan rumah Dinas/jabatan	Jumlah rumah dinas/jabatan yang dibangun	1 Keg.	350,000	1 Keg.	300,000	1 Keg.	200,000
		13. Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Keg.	57,063	1 Keg.	200,000	1 Keg.	200,000
		14. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Opr. Yang dibeli	6 unit	440,000	15 unit	300,000	10 unit	400,000
		15. Pengadaan Peralatan dan Pertengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	1 Keg.	170,500	1 Keg.	178,500	1 Keg.	154,000
		16. Rehabilitasi Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah Gedung Kantor yang direhab	1 Keg.	214,500	1 Keg.	150,000	1 Keg.	50,000

No.	TUJUAN *)	INDIKATOR TUJUAN **)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	1. Penyusunan Laporan Keuangan 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah 3. Pengembangan Sistem Informasi manajemen	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun Jumlah sistem informasi yang dikembangkan



**KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN,  
SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DENGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUMENEP  
TAHUN 2016 - 2021**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUMENEP**

- Dinas Perikanan Kab. Sumenep  
: Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang perikanan  
:  
:  
1. Penetapan kebijakan, pengelolaan administrasi yang meliputi ketibahasahan, umum dan kepegawalan, keuangan;  
2. Penyelenggara bimbingan, pengelolaan dan pelaksanaan program pembangunan bidang perikanan yang menjadi kewenangan Kabupaten;  
3. Penetapan kebijakan teknis pengelolaan perikanan tangkap;  
4. Penetapan kebijakan teknis pemberdayaan nelayan kecil;  
5. Penetapan kebijakan teknis perikanan budidaya;  
6. Penetapan kebijakan teknis kelembagaan dan pengendalian usaha perikanan;  
7. Penetapan hasil kerja Star sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja; dan  
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

1. OPD  
2. Tugas Pokok  
3. Fungsi

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TARGET	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul dan berdaya saing tinggi	1. Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan 2. Meningkatkan Produksi Perikanan	Nilai Tukar Nelayan Produksi Hasil Perikanan (Ton)	Meningkatnya Pendapatan Nelayan Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kelompok Perikanan Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Jumlah Pendapatan Masyarakat Nelayan per-Kapita Jumlah Kelompok Perikanan yang Berhasil dibina & Berbadan Hukum Produksi Perikanan : - Produksi Hasil Perikanan Tangkap - Produksi Hasil Perikanan Budidaya	Rp / Kapita / Tahun Kelompok Ton Ton	$\frac{\sum \text{Nilai Produksi Perikanan}}{\sum \text{Nelayan}}$ $\frac{\sum \text{Kelompok Perikanan Kab. Sumenep}}{\sum \text{Produksi Perikanan Tangkap per Tahun}}$ $\frac{\sum \text{Produksi Perikanan Budidaya per Tahun}}{\sum \text{Produksi Perikanan Budidaya per Tahun}}$	Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUMENEP  
TAHUN 2016-2021

URUSAN PEMERINTAHAN	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TARGET	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN	TAHUN DASAR 2016		2017		2018		2019		2020		2021		
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET
Kecamatan dan Perikanan	MISI 2 : Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan membentengi petani ekonomi lokal yang unggul dan berdaya saing tinggi	3 1. Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan 2. Meningkatnya Produksi Perikanan	4 Nilai Tukar Nelayan Produksi Hasil Perikanan (Ton)	5 Meningkatnya Penedaguan Nelayan Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Kelompok Perikanan Meningkatnya Produk Perikanan Tangkap dan Budidaya	6 Jumlah Pendapatan Masyarakat Nelayan per-Kepala Jumlah Kelompok Perikanan yang Berhasil dibina & Berbadan Hukum (lengkap)	7 Σ Nilai Produk Perikanan Σ Nilai Produk Perikanan Kab. Sumenep	0	16	11	12	14	19	16	17	19	19	19	19	20
							71,00	164	125	128	150	237	160	250	170	170	221	221	221
							47.100	47.600	47.600	47.927,52	48.100	48.000	48.510,00	49.000	42.190,11	49.000	42.190,11	49.300	
							610.172	678.459	678.459	661.078,02	647.264	661.078,02	1.517	4.188	1.544	6.104,48	1.575	6.104,48	1.575

